

Memahami dan Menghargai Perjuangan R. Soediro Wirjo Soehardjo dalam Historiografi Indonesia *)

Oleh: Andi Suwirta

Pengantar

Memahami pribadi dan peran tokoh sejarah, dalam pengertian seseorang yang mampu membuat sejarah dalam kehidupannya, mesti dilihat dalam konteks jiwa dan semangat zaman. Namun bisa juga difahami bahwa seorang tokoh sejarah itu acapkali menyimpang, atau mendahului, dari *mainstream* jiwa dan semangat zamannya. Dalam hal ini muncul pertanyaan filosofis yang pelik, yakni apakah individu yang membuat sejarah atau sejarah yang membentuk individu sehingga melahirkan seorang *hero* dalam masyarakatnya?

Tulisan ini, berdasarkan sumber dan data yang terbatas, ingin memberikan pemahaman tentang kedudukan dan peran yang telah dimainkan oleh seorang pelaku sejarah, R. Soediro Wirjo Soehardjo, dalam episode pengalaman dan perjuangan hidupnya. Dengan memberikan gambaran tentang jiwa dan semangat zaman; serta pilihan, peluang, dan resiko dari sikap hidupnya, tulisan ini ingin menempatkan tokoh sejarah dalam perspektif yang sewajarnya; serta apa makna dari pilihan hidupnya yang penuh dengan resiko dan pengorbanan itu bagi kita sekarang.

Apa dan Siapa R. Soediro Wirjo Soehardjo

Dalam wacana sejarah kontemporer Indonesia, barangkali kita lebih akrab mengenal ketokohan Herman Sarens Soediro daripada ayahnya, R. Soediro Wirjo Soehardjo. Hal ini disebabkan karena kecenderungan historiografi konvensional Indonesia yang berorientasikan *the great man theory*, seolah-olah kisah sejarah itu

*)Makalah ini pernah disajikan dan didiskusikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian UNPAD (Universitas Padjadjaran) bekerjasama dengan MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia) Cabang Jawa Barat di Bandung, pada tanggal 15 April 2006.

hanya untuk para jenderal, politisi, negarawan, diplomat, tokoh agama, dan orang-orang penting lainnya. Sedangkan orang-orang “kecil dan biasa-biasa” saja baru diberi tempat dalam historiografi Indonesia pada tahun 1960-an, ketika Sartono Kartodirdjo (1966) menjelaskan tentang kedudukan dan peranan para petani di Banten.

R. Soediro Wirjo Soehardjo dilahirkan pada tanggal 2 Februari 1900 di Pematang, Jawa Tengah. Dari tahun kelahirannya, jelaslah bahwa ia adalah sezaman dengan Soekarno (lahir 1901) dan Mohamad Hatta (lahir 1902), sebuah generasi baru pada awal abad ke-20 yang akan mengalami masa-masa *critically* seperti zaman *Etische Politiek* (1901-1918), Zaman Bergerak (1908-1942), Zaman Jepang (1942-1945), dan Zaman Revolusi Indonesia (1945-1950). Generasi yang lahir pada zaman ini memang ditengarai bukan saja sebagai *homine novus* (manusia baru) karena berkenalan secara intens dengan modernitas Barat, tetapi juga akhirnya ditakdirkan oleh sejarah sebagai *primus novus* (pemimpin baru) dalam mencita-citakan (*to imagine*) dan mewujudkan (*to realize*) negara-bangsa baru yang bernama Republik Indonesia (Van Niel, 1984; Brugmans, 1990; Anderson, 1993; dan Ferederick, 1989).

Sebagaimana generasi yang mengalami Politik Etis, maka R. Soediro Wirjo Soehardjo (selanjutnya disingkat SWS) menempuh pendidikan dasar dan menengah modern *a la* Barat sampai dengan MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*), sama dengan SMP (Sekolah Menengah Pertama) sekarang. Untuk ukuran zaman itu, seseorang yang tamat MULO sudah cukup hebat bukan saja karena ia mampu menguasai bahasa modern (Belanda, Inggris, dan lain-lain, di samping bahasa Melayu) tetapi juga memiliki keterampilan (*life skill*) yang dibutuhkan masyarakat. Dengan bekal pendidikan yang diperolehnya itu SWS pernah menjabat sebagai kontrolir kabupaten (*regentschap controleur*) dan mengalami proses TOD (*Tour of Duty*) dan TOA (*Tour of Area*) di luar daerah kelahirannya, termasuk pernah bertugas di Pandeglang, Banten.

Satu catatan penting barangkali adalah bahwa menjadi pejabat pribumi (*binnenlands bestuur*) pada zaman kolonial Belanda dan zaman pergerakan nasional Indonesia jelas merupakan pilihan karier yang sulit dan dilematis. Sebagaimana diakui dan dialami sendiri oleh R. Achmad Djajadiningrat (Bupati Serang di Banten) bahwa bagi dirinya pada waktu itu ikut orang Belanda akan cilaka dan ikut orang pergerakan pun akan bahaya (Soeroto & Frederick eds., 1987). Saya kira hal semacam ini mungkin dialami juga oleh SWS. Namun yang tidak boleh dilupakan adalah fakta bahwa ketika perjuangan yang bersifat non-kooperatif ditindas secara keras pada tahun 1930-an

maka strategi kooperatif merupakan pilihan paling rasional dan efektif, yang juga akhirnya ditempuh oleh tokoh-tokoh nasionalis moderat. Periode ini sering disebut sebagai “zaman normal” dalam sejarah Indonesia, yang ditandai oleh menguatnya peran pemerintah kolonial yang bercorak *beamtenstaat* terhadap masyarakatnya (Onghokham, 1987; dan Sutherland, 1988).

Memasuki zaman Jepang, SWS pindah ke daerah Banjar, Ciamis di Jawa Barat. Tidak diketahui secara pasti apa kedudukan dan peranannya pada masa itu, karena namanya memang tidak termasuk dalam daftar *Orang Indonesia yang Terkemuka di Jawa*, yang dibuat oleh Gunseikanbu (pemerintah tentara Angkatan Darat) Jepang pada tahun 1944. Namun kalau melihat kecenderungan umum pada masyarakat Indonesia dan pilihan hidup SWS secara khusus kemudian, maka ia nampaknya memilih sikap berkolaborasi dengan pemerintah militer Jepang di satu sisi, dan di sisi lain mengagumi “semangat *bushido*” (yang kemudian diadaptasikan dengan “sifat kesatria sejati *a la* Indonesia”) sebagai ekspresi kecintaan dan pengabdian pada Tanah Air. Memang pada zaman pendudukan Jepang ini, betapapun singkat, telah terjadi partisipasi dan mobilitas sosial yang dinamis pada masyarakat Indonesia, tidak hanya di bidang politik, pemerintahan, dan birokrasi, tetapi juga di bidang ketentaraan, media massa, kebudayaan, dan agama (Benda, 1980; Kurasawa, 1992; dan Lubis, 2005). Efek psikologis massa lainnya pada zaman Jepang ini adalah kepercayaan yang tinggi pada semangat dan kemampuan diri sendiri sebagai bangsa Asia di satu sisi, dan di sisi lain penghargaan yang rendah dan penolakan terhadap segala sesuatu yang berbau Barat dengan sistem nilai kolonialismenya.

Memasuki Zaman Revolusi Indonesia: Berjuang Sampai Titik Darah Penghabisan

Karena itu mudah difahami mengapa SWS memilih jalan hidup untuk menjadi seorang tentara pada masa revolusi Indonesia. Betapapun ia pada masa itu tidak lagi tergolong “pemuda” (usia SWS di atas 40-an tahun), namun semangat kesatria mendorong diri dan keluarganya untuk berbakti kepada Tanah Air Indonesia melalui pengabdian hidup sebagai seorang tentara. Dalam catatan dan kenangan keluarga (Soediro, 2000:1) dikatakan bahwa setelah proklamasi kemerdekaan, SWS aktif dalam Badan Kemanan Rakyat (BKR) daerah Ciamis; dan setelah TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dibentuk pada bulan Oktober 1945, TRI (Tentara Rakyat Indonesia) dan kemudian TNI (Tentara Nasional Indonesia) pada bulan Mei 1946, SWS tetap menjadi seorang tentara dengan pangkat bintara

(Sersan Mayor). Mengingat usia, kemampuan, dan relasi sosialnya yang baik, SWS dipercaya untuk menangani masalah logistik tentara bagi Batalyon IV Resimen XI Divisi III Siliwangi, yang wilayah operasinya meliputi daerah Ciamis dan Banjar.

Menjadi tentara pada masa revolusi Indonesia saya kira sangatlah sukar dan tidak menyenangkan. Kebijakan pemerintah RI yang “setengah hati” kepada tentara dan membiarkan badan-badan perjuangan *a la* tentara (seperti lasykar dan barisan perjuangan) berdiri, menjadikan masing-masing organisasi harus mencari sendiri sumber daya yang ada untuk mampu berperan dan bertahan hidup (Anderson, 1988). Dalam konteks ini betapa penting dan strategisnya peran yang dimainkan oleh seseorang yang menangani masalah logistik, karena ia berkaitan dengan hidup dan matinya organisasi serta sukses dan gagalnya operasi tentara. Saya ingin menyinggung masalah ini nanti, dengan beberapa contoh dalam sejarah tentara Indonesia.

Sementara itu kecintaan SWS pada dunia tentara dan sikap hidup kesatria nampaknya begitu mendarah-daging. Hal itu dibuktikan dari cara mendidik putra-putrinya yang masih tergolong “pemuda-pelajar” untuk menjadi seorang Tentara Pelajar bagi 4 orang putranya (Eddy, Herman Sarens, Oete, dan Djoni) serta menjadi wanita yang aktif dalam perjuangan bagi 5 orang putrinya (Mince, Tince, Nani, Leni, dan Nine) dengan melibatkan diri dalam PMI (Palang Merah Indonesia), LASWI (Lasykar Wanita Indonesia), dan dapur umum. Istrinya, R.A.H. Artini Diposaputro, juga aktif dalam LASWI. Bahkan dua orang menantu laki-lakinya (Soekarna dan Soemarya) adalah juga seorang tentara (Sudarman ed., 1982:16).

Pada masa-masa awal revolusi Indonesia peran aktif yang dilakukan oleh SWS dan putra-putrinya sangat nyata. Dalam rangka menentang kehadiran pemerintah NICA (*Netherlands Indie Civil Administration*) Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia – dengan membonceng Tentara Sekutu, Inggris – SWS aktif berjuang bersama kelompok-kelompok sosial yang ada di daerah Banjar dan Ciamis. Sebagai bintang penghubung dalam kapasitasnya juga sebagai Kepala Logistik (perlengkapan/perbelakan/keuangan) Batalyon IV Resimen XI Divisi III Siliwangi, SWS mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tokoh-tokoh lintas organisasi, generasi, dan profesi. SWS misalnya mampu bekerjasama dengan orang KNI (Komite Nasional Indonesia) Daerah Ciamis, seperti Somaatmadja; tokoh BRI (Barisan Rakyat Indonesia) Kecamatan Pamarican, Ciamis, seperti F. Sumardja; dan pimpinan Hizbullah Cabang Ciamis, Ajengan Moh. Syamsudin. Dua organisasi terakhir ini pada bulan Desember

1945 pernah berjuang ke garis depan untuk mempertahankan Bandung Selatan dari tekanan tentara Inggris dan Belanda (Sudarman ed., 1982:14-15).

Begitu juga hubungan dan kerjasama yang baik dibangun oleh SWS dengan Korps Tentara Pelajar. Organisasi dengan logo perjuangan “pena dan senjata” ini pada masa revolusi Indonesia memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan (Darmawan, 2001; dan Sujito & Suwojo, 1991). Hubungan yang baik ini bukan semata-mata karena anak-anak SWS sendiri adalah anggota TPS (Tentara Pelajar Siliwangi), tetapi juga karena peran seorang “bapak” yang mampu berperan sebagai pendidik, pengemong, dan penasihat terhadap anak-anak muda dalam mengarungi fase-fase “kritis” dalam kehidupan mereka. Keberhasilan Herman Saren Soediro (sebagai perwira pertama TPS) menghubungi dan meminta bantuan logistik dari MBTD (Markas Besar Tentara Jawa) di Yogyakarta, di bawah pimpinan Jenderal Soedirman dan Jenderal Mayor Oerip Soemohardjo (Suarno, 2002:7), harus dilihat dalam konteks “relasi dan interaksi sosial yang baik” antara SWS dengan anak-anak TPS.

Yang tidak kalah pentingnya adalah hubungan dan kerjasama yang baik antara SWS dengan Ibu Parma dan keluarganya di daerah Banjar, Ciamis, Jawa Barat. Ibu Parma dan anak-anaknya tidak hanya membantu perjuangan SWS tetapi juga merelakan rumahnya dijadikan markas bagi kepentingan logistik Batalyon IV Resimen XI Divisi III Siliwangi (Sudarman ed., 1982:22). Hubungan yang kental antara TNI dengan masyarakat ini mengingatkan kita pada pengalaman gerilya T.B. Simatupang (1961) di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada masa revolusi Indonesia, ketika perwira tinggi TNI ini menuliskan catatan-catatan hariannya, yang kemudian dibukukan, menjadi *Laporan dari Banaran*. Buku ini menjadi bukti – termasuk juga apa yang dialami oleh SWS di desa Panyusupan kecamatan Pamarican, Banjar, Ciamis, Jawa Barat – bahwa hubungan TNI dengan rakyatnya tidak hanya digambarkan seperti “ikan di dalam air” tetapi juga menjadi modal bagi pengembangan doktrin TNI yang lahir dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia.

Sebagai bintanga penghubung (*intendan*) dan kepala bagian logistik tentara, SWS harus siap untuk mendukung operasi dan kegiatan TNI di berbagai medan dan front pertempuran. Tercatat, misalnya, bahwa SWS pada masa revolusi Indonesia turut terlibat aktif dan berjuang di daerah-daerah seperti: Bandung utara dan Subang selatan pada awal tahun 1946; serta Jakarta timur, Tambun, Bekasi, Karawang, dan Cikampek pada akhir akhir tahun 1946

(Suarno, 2002:4-5). Pada awal tahun 1947, SWS dan pasukannya diperintahkan untuk kembali ke Ciamis dan Banjar. Di daerah inilah, tepatnya di desa Panyusupan, kecamatan Pamarican, Banjar selatan, Ciamis, SWS ditugaskan oleh Komandan Batalyon IV Resimen X Divisi III Siliwangi, Mayor R. Hamara Effendy, untuk mengadakan konsolidasi dan persiapan logistik yang memadai.

Karena kedudukannya yang penting dalam organisasi ketentaraan, yakni sebagai kepala logistik, maka tidaklah mengherankan kalau SWS termasuk tokoh yang dicari-cari oleh pihak militer Belanda. Ketika terjadi aksi militer I Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 dan tentara Belanda mampu melaju untuk menduduki kota-kota penting di Jawa dan Sumatera, termasuk daerah Banjar dan Ciamis di Jawa Barat sejak bulan Agustus hingga Desember 1947, SWS dan teman-temannya terus berjuang mempertahankan diri dari agresi musuh. Akhirnya pada tanggal 19 Desember 1947, dalam sebuah pertempuran yang tidak seimbang antara tentara Belanda dan pasukan TNI dari Batalyon IV Resimen XI Divisi III Siliwangi di desa Panyusupan, kecamatan Pamarican, Banjar, Ciamis (di mana SWS bertugas), saat-saat kritis dalam kehidupannya harus diterima dengan jiwa dan sikap kesatria. Dalam kenangan keluarga dan masyarakat di sekitarnya, akhir hayat dari perjuangan hidup SWS itu digambarkan sebagai berikut:

[...] Pada tanggal 19 Desember 1947 pagi hari, pasukan Belanda menyerang desa Panyusupan dari arah Cikupa. Serangan disertai tembakan gencar, dibantu mortir, khususnya diarahkan ke sasaran pos TPS di sekitar hutan jati Geger Banteng. Ketika serangan terjadi, Serma Soediro sedang membereskan sisa perbekalan sehingga kurang siap. Akhirnya pasukan Indonesia berhasil dihancurkan melalui pertempuran tidak seimbang. Serma Soediro bertempur dengan gagah berani sehingga tertangkap. Dalam keadaan tidak berdaya, tentara Belanda membacok kedua kakinya dengan golok, kemudian menembak mati. Serma Soediro gugur sebagai kusuma bangsa dalam tugas mempertahankan kemerdekaan. Ikut gugur ajudan Saiban, yang juga sebelumnya menderita siksaan dengan pembacokan dimana adanya sempat dibelah sebelum ditembak mati. [...] (Sudarman ed., 1982:9).

SWS gugur bersama ajudannya, Saiban, dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Turut gugur juga, akibat aksi militer I Belanda ini, putra-putri terbaik bangsa yang bergabung dalam TPS seperti Kalwan, Sadli, Sumardi, dan Supena; anggota TNI petugas PHB, Abdul Madjid; dan rakyat biasa seperti Patma dan Hadili (Sudarman ed., 1982:9-10). Mereka telah berjuang demi kemerdekaan dan gugur sebagai kusuma bangsa. Kenanglah mereka, hargai jasa-jasanya, dan warisi semangat juangnya. Sebab bangsa

yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya (Soekarno, 1966).

Memahami perjuangan dan takdir hidup yang dialami oleh SWS meningkatkan saya – betapapun dalam konteks yang berbeda – pada peristiwa gugurnya Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan tahun 1965, yang juga adalah Asisten MENPANGAD (Menteri Panglima Angkatan Darat) bagian logistik. Dengan begini saya ingin menyinggung betapa penting dan strategisnya kedudukan seseorang yang menjabat sebagai kepala bagian logistik dalam ketentaraan itu. Sukses tidaknya sebuah operasi militer dan perjuangan, dalam derajat tertentu, ditentukan oleh siap tidaknya dukungan logistik ini. Dalam konteks ini juga saya ingin membuat analogi kembali dengan peristiwa sejarah kurang-lebih 20 tahun kemudian, dimana di dalam sejarah Indonesia modern tercatat, misalnya, bahwa kegagalan G-30-S (Gerakan 30 September)-nya Kolonel Untung pada tahun 1965 – disamping faktor-faktor lain – disebabkan karena dukungan logistik yang dijanjikan oleh Mayor Suyono tidak juga datang (Crouch, 1986; dan Dake, 2005). Sebaliknya, sukses yang diraih oleh Jenderal Soeharto menjadi orang nomor 1 di Republik ini pada akhir tahun 1960-an – disamping faktor-faktor lain – tidak lepas dari dukungan logistik yang dimotori oleh perwira-perwira tinggi pembantu setianya seperti: Soerjo, Sudjono Humardhani, Tirta Sudiro, dan lain-lain (Mas'ood, 1987; dan Elton, 2005).

Penutup: Memaknai *Esa Hilang Dua Terbilang*

Revolusi Indonesia, demikian menurut Soedjatmoko (1992) dalam refleksinya, menghadirkan tantangan, peluang, pilihan hidup, dan resiko bagi individu-individu yang terlibat di dalamnya. Pilihan dan sikap hidup individu itu dalam banyak hal ditentukan oleh latar belakang sosial, pengalaman, orientasi, dan cita-citanya. Apa yang akan terjadi kemudian, selain berserah diri kepada Tuhan, juga dipandu oleh semangat, tekad, keyakinan, dan cita-cita hidup individu tersebut.

Dalam konteks ini kita bisa memahami dan menghargai pilihan hidup, sikap, dan kecintaan SWS pada dunia tentara sebagai wahana untuk berbakti kepada Tanah Air Indonesia. Pada masa revolusi Indonesia, dengan demikian, keluarga SWS bukan hanya dikenal sebagai “keluarga gerilya” (sebab istri dan putra-putrinya memang turut berjuang dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan) tetapi juga dikenal sebagai “keluarga tentara” (karena semua putra dan menantu laki-lakinya adalah tentara). SWS sendiri adalah seorang “kesatria sejati”, yang memilih dunia tentara sebagai profesi

hidupnya, menghayati kehidupan yang keras dan penuh disiplin, serta merelakan nyawa sebagai miliknya yang paling berharga sekalipun untuk kepentingan kemerdekaan dan kedaulatan bangsanya.

Akhirnya memahami perjalanan dan perjuangan hidup SWS mengingatkan kita pada motto tentara Siliwangi pada tahun 1950/1960-an, “Esa Hilang Dua Terbilang”. Motto ini relevan dikenakan pada diri SWS karena maknanya yang denotatif dan konotatif. Makna denotatifnya adalah karena SWS telah gugur (*hilang*) maka ia menjadi termasyhur (*terbilang*). Sedangkan makna konotatifnya adalah betapapun SWS telah gugur bukan berarti cita-cita dan semangatnya telah luntur, melainkan diteruskan oleh putra-putrinya dan oleh kita semua yang masih hidup, serta menikmati buah kemerdekaan ini sebagai hasil dari perjuangan para kusuma bangsa.

Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict R.O'G.. (1988). *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 1944-1946*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Anderson, Benedict R.O'G.. (1993). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. New York & London: Verso.
- Benda, Harry J.. (1980). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Zaman Pendudukan Jepang, 1942-1945*. Terjemahan. Jakarta: PT Pustaka Jaya,
- Brugmans. (1990).
- Crouch, Harold. (1986). *Militer dan Politik di Indonesia*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dake, Anthony C.. (2005). *In the Spirit of the Red Banteng: Indonesian Communism and Chinese Communism Relations. ...*
- Darmawan, Wawan. (2001). “Antara Pena dan Senjata: Tentara Pelajar Indonesia pada Masa Revolusi di Jawa Barat”. *Ringkasan Skripsi Sarjana*. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.
- Elton, Robert R.. (2005). *Suharto: Sebuah Biografi*. Terjemahan. Jakarta: ...
- Frederick, William H.. (1989). *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Surabaya dan Revolusi Indonesia, 1926-1946*. Terjemahan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, Sartono. (1966). *The Peasants' Revolt of Banten in 1888*. Gravenhage: Martinus Nijhoft.
- Kurasawa, Aiko. (1992). *Mobilisasi dan Kontrol. Masyarakat Pedesaan pada Zaman Pendudukan Jepang di Indonesia, 1942-1945*. Terjemahan. Jakarta: PT Grasindo
- ...
- Lubis, Nina Herlina. (2005). *PETA Cikal-Bakal TNI*. Bandung: Satya Historika dan Lemlit UNPAD Bandung.
- Mas'oeed, Mochtar. (1987). *Struktur Politik dan Ekonomi Orde Baru*.

*SEJARAH DAN PENDIDIKAN SEJARAH
Perspektif Malaysia dan Indonesia*

- Onghokham. (1987). Runtuhnya Hindia Belanda. ...
Soediro, Herman Sarens. (2000). ...
Soedjatmoko. (1992). "Pandangan dan Peluang? ...
Soekarno. (1966). Di Bawah Bendera Revolusi. ...
Soeroto, Soeri & William H. Frederick [eds.]. (1987). *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
Suarno. (2002). ...
Sudarman [ed.]. (1982). ...
Sujito & Suwojo. (1991). ...
Sutherland, Heather. (1988). Terbentuknya Elite Birokrasi Modern. ...
Van Niel, Robert. (1984). *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Jaya.